

# Effectiveness of the Social Welfare Information System Application Next Generation (SIKS-NG) in Managing Poverty Data in Simoangin-Angin Village

## [Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Dalam Mengelola Data Kemiskinan Di Desa Simoangin-Angin]

Nanda Adelia Nur Agustin<sup>1)</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnaagustina@umsida.ac.id](mailto:isnaagustina@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Social Welfare Information System–Next Generation (SIKS-NG) application in managing poverty data in Simoangin-angin Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency, using an effectiveness theory that includes the indicators of goal achievement, integration, and adaptation. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques conducted through interviews, observations, and documentation. Data analysis in this study was carried out systematically through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that: (1) In the goal achievement indicator, the implementation of the SIKS-NG application has not been fully optimal, as indicated by the existence of beneficiary data that had not been verified by the village government, particularly data originating from independent submissions. (2) In the integration indicator, the process of proposing social assistance beneficiaries has been implemented in accordance with the procedures applicable at the village level; however, the dissemination of information to the community remains limited, resulting in uneven public understanding. (3) In the adaptation indicator, users' ability to operate the SIKS-NG application has improved over time, although training and technical guidance for operators are still considered less than optimal in supporting the adjustment process to the system.*

**Keywords** - Effectiveness; Poverty; SIKS-NG Application

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam mengelola data kemiskinan di Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori efektivitas yang mencakup indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada indikator pencapaian tujuan, penerapan aplikasi SIKS-NG belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan masih adanya data penerima bantuan yang belum diverifikasi oleh pemerintah desa, khususnya yang berasal dari pengusulan mandiri. (2) Pada indikator integrasi, proses pengusulan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di tingkat desa, namun pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga pemahaman masyarakat belum merata; (3) Pada indikator adaptasi, kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG menunjukkan peningkatan seiring berjalannya waktu, meskipun pelatihan dan bimbingan teknis bagi operator masih dirasakan kurang optimal dalam mendukung proses penyesuaian terhadap sistem..*

**Kata Kunci** - Aplikasi SIKS-NG; Efektivitas; Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah krusial yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia [1]. Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai situasi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak [2]. Permasalahan ini terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan, rendahnya upah kerja yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, serta kualitas hidup masyarakat yang rendah [3]. Kondisi ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tanpa adanya intervensi kebijakan dari pemerintah.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Di Indonesia, persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sudah berlangsung sejak lama dan terus dihadapi oleh masyarakat [4]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang, atau sekitar 9,03% dari total populasi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perlunya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu menjadi prioritas yang harus ditangani dengan pendekatan yang serius dan menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial memiliki kewajiban dalam mengatur pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat agar mereka dapat berkembang dan hidup dengan layak dalam hal ini menyelesaikan masalah kemiskinan [5].

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin [6]. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan dari berbagai program bantuan sosial yang bergantung pada ketersediaan data masyarakat miskin yang akurat [7]. Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial masih sering mengalami ketidaktepatan sasaran akibat banyak data penerima program yang tidak valid. Dengan demikian, data kemiskinan memiliki peran yang sangat krusial karena data tersebut menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sekaligus untuk menjamin efektivitas dari program.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan terobosan inovasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan penerapan *E-Government*, yaitu dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola data kemiskinan [8]. Aplikasi SIKS-NG ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2017 dengan tujuan untuk membantu verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang lebih banyak serta memberikan kontribusi dalam penurunan kemiskinan [9]. Adapun regulasi mengenai penerapan aplikasi SIKS-NG telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mana peraturan tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019 [10].

Selain itu, aplikasi SIKS-NG digunakan sebagai wadah untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin atau yang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan akurat mengenai kondisi kesejahteraan sosial masyarakat dan digunakan sebagai dasar pengajuan berbagai bentuk bantuan sosial [11]. Adapun program bantuan sosial yang mengacu pada DTKS antara lain yakni terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Sembako, yang sebelumnya program ini bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) [12].

Sebagai basis data utama dalam program bantuan sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam menentukan dan mengusulkan calon penerima bantuan sosial. Penggunaan DTKS tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Oleh karena itu, proses pengusulan bantuan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis dan berjenjang agar data yang diusulkan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Proses pengusulan diawali dengan kegiatan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa atau petugas yang ditunjuk. Pendataan tersebut dapat berasal dari hasil observasi langsung, usulan RT/RW, maupun laporan dari masyarakat. Data yang telah diperoleh kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa untuk menentukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Melalui forum tersebut, proses penetapan calon penerima bantuan sosial dilakukan secara partisipatif dan tidak hanya berdasarkan keputusan sepihak pemerintah desa.

Setelah data calon penerima bantuan sosial disepakati dalam musyawarah desa, operator desa selanjutnya melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). Pada tahap ini, operator memasukkan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta jenis program bantuan sosial yang diusulkan. Selanjutnya, data yang telah diinput akan melalui tahapan verifikasi dan validasi, baik secara administratif maupun substantif, untuk memastikan kesesuaian data dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 [13]. Tahapan tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial yang tercatat dalam sistem benar-benar akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Adapun dalam mendukung proses pengusulan bantuan sosial tersebut, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat diakses oleh operator desa. Salah satu fitur utama adalah fitur pengusulan data yang digunakan untuk mengajukan masyarakat sebagai penerima calon bantuan sosial berdasarkan hasil pendataan lapangan. Melalui fitur ini, pemerintah desa dapat memasukkan data keluarga secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, terdapat fitur verifikasi dan validasi data, yang berfungsi untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data yang diusulkan. Fitur ini membantu operator dalam melakukan pengecekan ulang terhadap data masyarakat sehingga dapat

mengurangi potensi kesalahan dan ketidaktepatan sasaran bantuan. Aplikasi SIKS-NG juga dilengkapi dengan fitur pemeringkatan desil, yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam tingkat kesejahteraan tertentu berdasarkan indikator sosial ekonomi. Fitur ini menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar tujuan dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Selain itu, terdapat fitur rekapitulasi data, yang menyajikan ringkasan data keluarga dan individu berdasarkan keinginan kesejahteraan, status pemeringkatan, serta kondisi keaktifan data. Fitur ini memudahkan pemerintah desa dalam menyatukan sebaran data kemiskinan dan jumlah calon penerima bantuan sosial.

Selain fitur-fitur tersebut, aplikasi SIKS-NG juga menyediakan fitur perbaikan dan pemutakhiran data, yang digunakan untuk memperbarui data warga jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan komposisi keluarga, maupun kesalahan data sebelumnya. Melalui fitur ini, data penerima bantuan sosial dapat disesuaikan secara berkala agar tetap akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi SIKS-NG membantu pemerintah desa dalam mengelola data penerima bantuan sosial secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis data. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan fitur-fitur tersebut sangat bergantung pada kapasitas operator desa, ketersediaan pelatihan, serta proses verifikasi lapangan yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun SIKS-NG telah menyediakan fitur yang cukup lengkap, optimalisasi penggunaannya masih memerlukan peningkatan dari sisi sumber daya manusia dan mekanisme pendukung lainnya.

Di Kabupaten Sidoarjo, semua desa telah menerapkan aplikasi SIKS-NG untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desa Simoangin-Angin menjadi salah satu desa yang telah mengimplementasikan aplikasi SIKS-NG sebagai alat bantu utama dalam proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) sejak tahun 2021 dengan menunjuk kasi kesejahteraan sebagai operator yang menjalankan aplikasi SIKS-NG. Sebelum adanya aplikasi SIKS-NG, proses pengelolaan data kemiskinan di Desa Simoangin-Angin masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara sistematis. Pendataan masyarakat dilakukan melalui pencatatan oleh perangkat desa dan usulan dari RT/RW tanpa didukung oleh sistem digital yang terpusat. Kondisi ini menyebabkan proses pengolahan data menjadi kurang efisien, memerlukan waktu yang lebih lama, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data akibat keterbatasan dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Akibatnya, tingkat efektivitas dalam pengelolaan data kemiskinan sebelum adanya SIKS-NG dapat dikatakan belum optimal, terutama dalam aspek ketepatan data dan kecepatan pelayanan.

Sementara itu, setelah diterapkannya aplikasi SIKS-NG, Pengelolaan data kemiskinan di Desa Simoangin-Angin mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan penggunaan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo telah membantu desa dalam mempercepat dan memudahkan proses pengumpulan serta verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial. Keberadaan sistem berbasis digital ini membuat proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Selain itu, aplikasi SIKS-NG juga memudahkan pemerintah desa dalam mengidentifikasi masyarakat yang layak menerima bantuan sosial berdasarkan data kesejahteraan yang telah tercatat di dalam sistem. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pendataan dan pengusulan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih efisien sehingga membantu pemerintah desa dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup kompeten, khususnya operator desa yang mampu menjalankan dan memahami penggunaan aplikasi secara bertahap. Selain itu, pemerintah desa juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang mendukung kelancaran proses pengelolaan data dalam aplikasi. Ketersediaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi operator desa dalam melakukan proses input data, verifikasi data, hingga pembaruan data masyarakat penerima bantuan sosial. Dengan dukungan sumber daya manusia serta fasilitas yang memadai, penggunaan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin dinilai mampu membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data kemiskinan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis digital, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penerima bantuan sosial setelah diterapkannya aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin, berikut disajikan data rekapitulasi jumlah penerima bantuan sosial dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Data tersebut menunjukkan perkembangan jumlah penerima bantuan sosial yang tercatat dalam proses pengelolaan data kesejahteraan sosial di desa. Adapun rekapitulasi jumlah penerima bantuan sosial di Desa Simoangin-Angin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial di Desa Simoangin-Angin

| No. | Tahun | Jumlah Penerima Bantuan Sosial |
|-----|-------|--------------------------------|
| 1.  | 2022  | 246                            |
| 2.  | 2023  | 214                            |
| 3.  | 2024  | 196                            |

*Sumber : Pemerintah Desa Simoangin-Angin (2025)*

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial di Desa Simoangin-angin mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan sosial tercatat sebanyak 246 penerima, kemudian menurun menjadi 214 penerima pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 196 penerima pada tahun 2024. Penurunan jumlah penerima bantuan sosial tersebut menunjukkan adanya perubahan data kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh proses verifikasi dan validasi data melalui aplikasi SIKS-NG. Selain itu, perubahan jumlah penerima bantuan juga dapat dipengaruhi oleh proses pemutakhiran data, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta penyesuaian kriteria penerima bantuan sosial berdasarkan klasifikasi sistem kesejahteraan atau desil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, perubahan jumlah penerima bantuan sosial tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data melalui aplikasi SIKS-NG tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendataan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial.

Meskipun demikian, dalam penerapan program bantuan sosial di Desa Simoangin-Angin masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) sebagai sistem pengelolaan data penerima bantuan. Adapun permasalahan yang ditemukan antara lain : 1) keterbatasan pelatihan atau bimbingan teknis yang diterima oleh operator desa. 2) Masih ditemukan terdapat ketidaksesuaian data penerima sehingga ditemukan adanya selisih antara jumlah alokasi penerima bantuan di aplikasi dengan jumlah realisasi penerima bantuan. 3) Belum dilakukannya sosialisasi terkait aplikasi SIKS-NG secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang belum memahami fungsi, manfaat, maupun mekanisme pengusulan bantuan sosial melalui sistem tersebut. Berbagai kendala ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi SIKS-NG telah digunakan sebagai instrumen pengelolaan data bantuan sosial, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Temuan permasalahan dalam pemanfaatan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi sistem informasi kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yakni Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sekar Arum Puspita Ramadhani & Isna Fitria Agustina (2025) dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengelolah Data Kemiskinan Desa”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif serta menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers (1985) sebagai landasan teori yang mencakup indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara optimal. Hal ini karena kehadiran aplikasi ini dinilai mampu mendukung proses penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tertata. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya hambatan berupa belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) oleh pihak pengembang aplikasi terhadap operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) [14].

Penelitian kedua dilakukan oleh Lailul Mursyidah & Fadila Putri Arydianti (2024) dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial”. Penelitian tersebut menggunakan teori Richard M. Steers sebagai acuan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam indikator adaptasi masih terdapat beberapa hambatan seperti terbatasnya pelatihan bagi operator, munculnya kendala teknis dalam aplikasi, serta permasalahan dalam pembaruan sistem. Sementara itu, pada indikator pencapaian tujuan ditemukan adanya ketidaksamaan antara data penerima bantuan yang diajukan oleh pihak desa dengan data dari pusat. Adapun pada indikator integrasi menunjukkan kurang optimalnya sosialisasi terkait aplikasi SIKS-NG menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan penerima bantuan masih rendah [15].

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Haromin dan Dhika Andriyansyah (2022). dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation SIKS-NG sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung”. Penelitian tersebut menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Streers dengan tiga indikator yang digunakan yaitu: Adaptasi, Pencapaian Tujuan dan Integrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek adaptasi, penerapan aplikasi SIKS-NG dinilai sudah cukup baik karena sistem tersebut mampu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya kelompok masyarakat menengah kebawah yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial. Dari sisi sumber daya manusia, operator desa dinilai telah memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG. Meskipun demikian, dari segi sarana dan prasarana masih belum maksimal karena minimnya perhatian dari desa. Sementara itu, pada indikator pencapaian tujuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan mengacu pada data masyarakat yang berstatus ekonomi rendah, sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meskipun demikian, pencapaian tujuan dirasa masih belum optimal karena dalam proses pengumpulan data tidak didukung dengan verifikasi langsung melalui kunjungan lapangan. Di sisi lain, pada dimensi Integrasi, pemerintah desa telah mengandeng perangkat desa seperti Kepala Dusun, RW dan RT dalam pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG. Keterlibatan unsur perangkat desa tersebut bertujuan agar sosialisasi

yang dilakukan dapat menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme dari SIKS-NG masih belum optimal. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa untuk meningkatkan intensitas serta kualitas sosialisasi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat [16].

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Zebua dkk. (2024), dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi” Penelitian tersebut menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh Richard M. Steers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG di Desa Balohili Botomuzoi masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang tersedia masih terbatas sehingga kurang mendukung operasional. Selain itu, dari segi pemanfaatan aplikasi SIKS-NG masih rendah, mengingat penggunaan aplikasi SIKS-NG hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain dalam aspek integrasi, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa atau operator SIKS-NG Desa Balohili Botomuzoi belum berjalan secara optimal, sehingga informasi terkait penggunaan aplikasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Kendala lain yang sering dihadapi oleh operator yakni aplikasi sering mengalami gangguan teknis yang disebabkan oleh jaringan yang kurang stabil [17].

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Dalam Mengelola Data Kemiskinan di Desa Simoangin-Angin”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi yang digunakan dalam mengelola data kemiskinan di Desa Simoangin-Angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers yang terdiri dari beberapa indikator yang meliputi : Pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi [18]. Pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana organisasi mampu merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Integrasi mengacu pada kemampuan organisasi dalam menjalin koordinasi dan kerja sama, yang dapat dilihat melalui kesesuaian pelaksanaan prosedur serta efektivitas sosialisasi program kepada pihak terkait. Sementara itu, adaptasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, yang ditunjukkan melalui kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif dalam bentuk ucapan maupun tulisan, serta tindakan yang dapat diamati dari individu [19]. Lokasi penelitian ini berada di Desa Simoangin-Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama dalam penelitian ini yakni terkait efektivitas penerapan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Desa Simoangin-Angin. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder menggunakan berbagai sumber rujukan seperti Jurnal, Artikel ilmiah, dokumen dan media massa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling (sampel bertujuan) untuk memilih informan yang memiliki wawasan dan pemahaman mendalam mengenai isu yang sedang diteliti, serta bersedia menyediakan data dan informasi yang tepat dan akurat mengenai permasalahan tersebut. Informan yang terlibat dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan serta masyarakat penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan model analisis oleh Miles dan Huberman (1994:20) yang terdiri dari : pertama yakni tahap pengumpulan data merupakan proses awal dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti berusaha menghimpun data secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, tahap reduksi data adalah proses pemilahan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian, mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, serta menghilangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan agar data yang dijelaskan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Ketiga, Tahap penyajian data merupakan proses penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, bagan, atau gambar, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, maupun kecenderungan yang muncul dari data. Tahap ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah kesimpulan, yaitu proses merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan data yang telah dijelaskan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada awalnya dan dapat berkembang seiring dengan penambahan atau pendalaman data hingga diperoleh kesimpulan yang mantap dan konsisten [20].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) merupakan salah satu bentuk implementasi e-Government dalam bidang kesejahteraan di Indonesia. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengelola data kemiskinan, melakukan pemutakhiran data serta mengusulkan calon penerima bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sekarang berganti nama menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKSEN) sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Simoangin-Angin telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data kemiskinan di tingkat desa. keberadaan aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pemerintah desa, terutama dalam hal penginputan dan pembaruan data sosial yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan selaku operator aplikasi



**Gambar 1.** Tampilan Dashboard Aplikasi SIKS-NG  
Sumber : Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin (2025)

Berdasarkan Gambar 1. terdapat tampilan dashboar dari aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) di Desa Simoangin-Angin. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sebagai bentuk digitalisasi dalam pengelolaan data kemiskinan di desa. Pemanfaatan aplikasi SIKS-NG sangat membantu dalam proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan aplikasi ini juga menjadi penting mengingat masih adanya rumah tangga miskin yang perlu diidentifikasi dan dicatat secara akurat untuk keperluan pengusulan dan realisasi bantuan sosial. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi SIKS-NG mampu memberikan dampak terhadap pengelolaan data kemiskinan di Desa Simoangin-angin, digunakan pendekatan teoritis sebagai dasar analisis berikutnya. Untuk menilai efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Richard M. Steers yang terdiri dari tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator ini dijadikan acuan dalam mengukur sejauh mana aplikasi ini mampu mendukung pengelolaan data kemiskinan secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan

#### A. Pencapaian Tujuan

Menurut Richard M. Steers, pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas suatu organisasi yang dapat dilihat dari sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. [21]. Dalam konteks pengelolaan program bantuan sosial, pencapaian tujuan dapat dilihat dari ketepatan sasaran penerima bantuan, yaitu sejauh mana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin dapat dilihat dari ketepatan penentuan kelompok masyarakat yang menjadi target penerima bantuan sosial. Sasaran utama penerapan aplikasi ini adalah masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penentuan sasaran tersebut dilakukan berdasarkan data riil yang dihimpun melalui RT/RW serta disesuaikan dengan data yang telah tercatat dalam aplikasi SIKS-NG. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Untuk pengusulan data di aplikasi SIKS-NG ini kami mengutamakan kepada masyarakat miskin dan yang berhak mendapatkan bantuan. Pengusulannya ini juga di dasarkan pada data riil yang kami terima dari RT/RW serta data yang sudah tercatat di aplikasi.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Simoangin-angin telah melakukan proses pengusulan bantuan sosial dengan mengacu pada data riil yang diperoleh dari RT dan RW serta data yang telah tercatat dalam sistem SIKS-NG. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan bantuan sosial disalurkan secara

tepat sasaran kepada masyarakat yang tergolong miskin dan layak menerima. Selain itu, adanya penggabungan antara data lapangan dan data dalam sistem juga mencerminkan upaya untuk menjaga akurasi dan kesesuaian data penerima bantuan sosial, meskipun tetap diperlukan proses verifikasi yang cermat agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data yang diusulkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Simoangin-Angin yang menjelaskan bahwa dalam proses pengusulan penerima bantuan sosial, pemerintah desa memprioritaskan masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

*“Aplikasi SIKS-NG ini kan istilahnya aplikasi yang memang dirancang untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan ya, terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi kami dari pihak desa dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan, tentu kami akan memprioritaskan kepada masyarakat yang memang kondisinya kurang mampu. Biasanya data itu kami dapat dari RT/RW yang lebih mengetahui kondisiarganya.”* (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam menentukan calon penerima bantuan sosial berupaya memprioritaskan masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Penentuan sasaran penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari RT dan RW sebagai pihak yang mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya proses pendataan tersebut, pemerintah desa dapat mengidentifikasi masyarakat yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG sehingga bantuan yang diberikan diharapkan dapat tepat sasaran.

Lebih lanjut, ketepatan sasaran juga diperkuat dengan adanya kebijakan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan desil. Dalam sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok desil, dengan prioritas penerima bantuan berada pada desil 1 hingga desil 4. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin sebagai berikut :

*“Sekarang itu sudah ada sistem desil. jadi sekarang buat menentukan masyarakat layak tidaknya mendapatkan bantuan itu ya dilihat dari desil itu tadi. Untuk desil ini sendiri terdapat kelompok 1-10. Nah ini, setiap kelompoknya punya kriteria masing-masing, seperti desil satu itu masyarakat dengan pendapatan dibawah 500.000. Untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan itu biasanya dari desil 1 sampai 4. Ada juga kriteria lain seperti listrik dan penghasilan. Kalau ada anggota keluarga yang gajinya di atas UMP, biasanya langsung tidak dilayakkan oleh Kementerian Sosial.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penentuan kelayakan penerima bantuan sosial, pemerintah desa tidak hanya mengandalkan hasil pendataan di tingkat lokal, tetapi juga mengacu pada sistem klasifikasi desil yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi desil ini membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kondisi ekonomi, mulai dari desil 1 sebagai kelompok paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Dalam implementasinya, masyarakat yang berada pada rentang desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas utama sebagai penerima bantuan sosial karena dinilai paling membutuhkan. Selain itu, penentuan kelayakan juga mempertimbangkan indikator pendukung lainnya, seperti tingkat pendapatan, kondisi penggunaan listrik, serta status pekerjaan anggota keluarga. Bahkan, apabila terdapat anggota keluarga dengan penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), maka secara otomatis masyarakat tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi penerima bantuan sosial telah mengacu pada standar yang lebih terstruktur dan terukur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, meskipun dalam praktiknya tetap memerlukan penyesuaian dengan kondisi riil di lapangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial pada sistem DTSEN yang ada pada aplikasi SIKS-NG. Di mana dalam sistem tersebut, terdapat selisih antara jumlah alokasi penerima bantuan dengan jumlah realisasi di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu belum optimal. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan, berikut disajikan data perbandingan antara jumlah alokasi penerima bantuan yang tercatat dalam aplikasi SIKS-NG dengan jumlah realisasi penerima bantuan di lapangan.

**Tabel 2.** Data Penerima Bantuan Sosial di Desa Simoangin-angin

| No. | Jenis Bantuan Sosial                           | Jumlah Alokasi | Jumlah Realisasi |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1.  | Program Keluarga Harapan (PKH)                 | 91 KPM         | 88 KPM           |
| 2.  | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)                | 196 KPM        | 181 KPM          |
| 3.  | Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) | 300 KPM        | 285 KPM          |

*Sumber: Pemerintah Desa Simoangin-Angin, (2025)*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh jenis bantuan sosial di Desa Simoangin-angin mengalami selisih antara jumlah alokasi dan realisasi penerima di lapangan. Secara umum, jumlah realisasi penerima cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah alokasi yang tercatat dalam aplikasi SIKS-NG. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data antara sistem dan kondisi riil di lapangan, yang berdampak pada belum optimalnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Adanya selisih antara jumlah alokasi dan jumlah realisasi penerima bantuan sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya perbedaan hasil verifikasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat. Dalam proses pengusulan bantuan sosial, pemerintah desa mengalokasikan data masyarakat berdasarkan kondisi riil di lapangan melalui hasil pendataan dan pengamatan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, data yang telah diusulkan tersebut masih harus melalui proses verifikasi lanjutan oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Proses verifikasi tersebut dilakukan berdasarkan indikator nasional, seperti kesesuaian data administrasi kependudukan, tingkat kesejahteraan berdasarkan desil, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kriteria lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Akibat adanya proses verifikasi lanjutan tersebut, tidak seluruh masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah desa dapat disetujui sebagai penerima bantuan sosial, sehingga menyebabkan jumlah realisasi penerima bantuan di lapangan lebih rendah dibandingkan jumlah alokasi yang tercatat dalam sistem. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Biasanya memang tidak semua data yang kami usulkan itu diterima semua oleh pusat. Kadang ada warga yang menurut desa layak menerima bantuan, tapi setelah dilakukan verifikasi oleh pusat ternyata tidak masuk kriteria, misalnya karena desilnya berubah atau ada data administrasi yang tidak sesuai.”* (Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan pengusulan berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, keputusan akhir terkait penerima bantuan sosial tetap berada di pemerintah pusat melalui proses verifikasi lanjutan. Akibatnya, tidak seluruh masyarakat yang diusulkan atau tercatat dalam alokasi bantuan dapat disetujui sebagai penerima bantuan sosial.

Selain itu, selisih antara jumlah alokasi dan realisasi penerima bantuan sosial juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengusulan mandiri masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos tanpa melalui proses verifikasi awal dari pemerintah desa. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengajukan diri secara langsung sebagai calon penerima bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian data yang masuk ke dalam sistem belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Akibatnya, ketika dilakukan proses verifikasi lanjutan oleh pemerintah desa maupun pemerintah pusat, terdapat beberapa data masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial sehingga tidak dapat direalisasikan sebagai penerima bantuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Sekarang masyarakat juga bisa mengusulkan sendiri lewat aplikasi Cek Bansos. Jadi kadang ada data yang masuk langsung ke sistem tanpa melalui pengecekan awal dari desa. Nah kondisi seperti ini kadang membuat data di sistem dengan kondisi di lapangan jadi berbeda.”* (Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya fitur pengusulan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos memungkinkan masyarakat untuk mengajukan diri secara langsung sebagai calon penerima bantuan sosial tanpa melalui proses verifikasi awal oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian data yang masuk ke dalam sistem belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan, karena data usulan yang diajukan belum terlebih dahulu melalui proses pengecekan dan penyesuaian oleh pihak desa. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan antara data penerima bantuan sosial yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan, sehingga berdampak pada munculnya selisih antara jumlah alokasi penerima bantuan sosial dengan jumlah realisasi penerima bantuan di lapangan. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial masih perlu dioptimalkan agar data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailul Mursyidah & Fadila Putri Arydianti yang berjudul *“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial”*. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang diusulkan oleh pihak desa dengan data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengusulan telah dilakukan oleh pemerintah desa, namun hasil akhir yang ditentukan belum sepenuhnya selaras dengan data yang diajukan, sehingga menimbulkan perbedaan antara data usulan dan data penerima bantuan yang direalisasikan.

Pada indikator efektivitas menurut Richard M. Steers, pada dimensi pencapaian tujuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-angin masih belum optimal. Hal ini terlihat meskipun pemerintah desa telah melaksanakan proses pendataan dan pengajuan penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi aktual di lapangan serta mengacu pada data yang tersedia dalam sistem, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima

bantuan. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan adanya pengajuan mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos tanpa melalui tahapan verifikasi di tingkat desa, sehingga data yang masuk ke dalam sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, perbedaan hasil verifikasi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Pemerintah desa melakukan pendataan berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, sedangkan pemerintah pusat melakukan verifikasi lanjutan berdasarkan indikator nasional, seperti desil kesejahteraan, kelengkapan administrasi, dan kriteria penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya perbedaan antara jumlah penerima bantuan yang tercatat dalam sistem dengan realisasi di lapangan. Dengan demikian, penerapan aplikasi SIKS-NG belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuannya dalam menyediakan data yang akurat serta mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan proses verifikasi dan validasi data, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pengawasan terhadap setiap usulan yang masuk. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan data yang dihasilkan menjadi lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan sesuai sasaran.

## B. Integrasi

Menurut Richard M. Steers, integrasi merupakan kemampuan organisasi untuk menjalin kerja sama internal maupun eksternal secara harmonis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Integrasi ini berkaitan erat dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lapangan untuk memastikan kelancaran koordinasi dan efektivitas program[22]. Selain itu, keberhasilan integrasi dapat diukur berdasarkan sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi dalam penerapan SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaannya dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengusulan data penerima bantuan sosial di desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan beberapa unsur di tingkat desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Kalau untuk prosedur pendataan bantuan di desa sendiri biasanya kita melakukan musyawarah dengan BPD dan RT-RW. Dari situ RT-RW menyampaikan warga mana saja yang dianggap layak menerima bantuan, baru setelah itu desa mengusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pengusulan bantuan sosial di Desa Simoangin-angin telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, di mana proses pengusulan diawali melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas dan menentukan data warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Musyawarah desa dalam hal ini berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan terkait mekanisme pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan, sehingga data yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya, data yang telah disepakati tersebut diajukan oleh operator desa melalui aplikasi SIKS-NG sebagai bagian dari proses penginputan dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pengusulan bantuan sosial di Desa Simoangin-angin telah mengikuti tahapan yang semestinya, mulai dari musyawarah hingga pengajuan data ke dalam sistem.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Simoangin-angin yang menegaskan bahwa musyawarah desa menjadi tahapan penting dalam proses pengusulan data penerima bantuan sosial sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Beliau menyatakan bahwa:

*“Biasanya sebelum diusulkan melalui aplikasi, kami terlebih dahulu melakukan musyawarah desa dengan melibatkan RT dan RW untuk membahas masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan. Dari musyawarah itu kemudian disepakati data warga yang akan diusulkan melalui sistem.”* (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Simoangin-angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memanfaatkan forum musyawarah sebagai sarana koordinasi dan penyaringan awal terhadap data masyarakat yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan sosial, sehingga data yang diajukan telah melalui proses pertimbangan bersama sebelum dimasukkan ke dalam sistem.

Selain prosedur pengusulan data, integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG juga dapat dilihat dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi terkait aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-Angin tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat umum, melainkan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan ketua RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat. Dalam forum tersebut, pemerintah desa menyampaikan informasi terkait mekanisme pengusulan bantuan sosial, perubahan data, serta kebijakan pendataan yang terkait dengan penggunaan aplikasi SIKS-NG. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Sosialisasi terkait SIKS-NG ini biasanya kami sampaikan ke RT-RW melalui musyawarah. Untuk sosialisasinya sendiri biasanya kami lakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Dalam forum*

*tersebut kami sampaikan kepada perwakilan masyarakat seperti RT dan RW jika ada warga yang kurang mampu, silahkan diusulkan ke desa. Jadi untuk sosialisasi ke masyarakat sendiri tidak kami lakukan secara langsung, karena jika semua masyarakat dilibatkan tentunya semua akan berharap untuk mendapatkan bantuan.” (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).*

Berdasarkan pernyataan di atas, penyampaian informasi terkait aplikasi SIKS-NG dan mekanisme pengusulan bantuan sosial di Desa Simoangin-angin belum dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat, melainkan melalui perantara RT dan RW. Pola sosialisasi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih terbatas pada perangkat lingkungan sebagai perwakilan masyarakat. Meskipun informasi tetap dapat tersampaikan, keputusan untuk tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh didasarkan pada pertimbangan pemerintah desa untuk menghindari meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap bantuan sosial. Dengan adanya pembatasan tersebut, pemerintah desa berupaya mengendalikan potensi lonjakan permintaan bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, namun di sisi lain kondisi ini juga berpengaruh terhadap pemerataan pemahaman masyarakat terkait program bantuan sosial. Adanya keterbatasan sosialisasi ini berdampak pada kurang meratanya informasi yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat penerima bantuan sosial, yaitu Bapak Suyitno yang menyampaikan bahwa masyarakat tidak pernah menerima sosialisasi secara langsung dari pihak desa terkait aplikasi SIKS-NG. Ia menyatakan bahwa :

*“Setahu saya tidak pernah ada sosialisasi langsung dari pihak desa terkait aplikasi SIKS-NG. Kalau ada informasi soal bantuan biasanya kami dikasih tahu sama Pak RT saja, jadi tidak langsung dari orang desa. Untuk masalah bantuan biasanya kami mengajukan ke Pak RT buat minta bantuan. Tapi kadang kami juga mengajukan diri langsung ke pihak desa supaya bisa diberi bantuan.” (Hasil Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan, 2 Juli 2025).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah desa terkait aplikasi SIKS-NG maupun mekanisme pengusulan bantuan sosial. Informasi yang diterima masyarakat lebih banyak disampaikan melalui RT sebagai perantara, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak berlangsung secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain itu, keterbatasan akses informasi tersebut berdampak pada pola pengusulan bantuan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat cenderung mengajukan bantuan melalui RT sebagai jalur yang dianggap lebih mudah, namun di sisi lain terdapat pula masyarakat yang memilih untuk mengajukan diri secara langsung ke pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pemahaman masyarakat terkait prosedur pengusulan yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses integrasi dalam implementasi SIKS-NG, khususnya dalam aspek sosialisasi dan komunikasi, belum berjalan secara optimal. Kurangnya penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat berpotensi menimbulkan kebingungan serta mendorong munculnya praktik pengusulan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Untuk memperkuat hasil temuan terkait pelaksanaan sosialisasi, berikut disajikan dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simoangin-angin melalui forum musyawarah desa :



**Gambar 1.** Sosialisasi Aplikasi SIKS-NG

*Sumber : Operator Aplikasi SIKS-NG Desa Simoangin-Angin (2025)*

Gambar tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan dalam forum musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa serta RT dan RW sebagai perwakilan masyarakat. Hal ini menguatkan bahwa proses sosialisasi belum dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat, melainkan masih terbatas melalui perantara.

Permasalahan diatas sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Zebua dkk. (2024), dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun operator SIKS-NG masih belum optimal, sehingga menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pendataan dan pengusulan bantuan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-angin pada indikator integrasi menurut Richard M. Steers telah berjalan dalam aspek koordinasi prosedur pengusulan data. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan berbagai unsur, seperti perangkat desa, RT, RW, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa sebagai wadah pembahasan dan penentuan calon penerima bantuan sosial. Namun demikian, pada aspek sosialisasi masih ditemukan keterbatasan, di mana penyampaian informasi belum dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya melalui perwakilan RT dan RW. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengusulan bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG, sehingga memengaruhi kualitas integrasi, khususnya dalam aspek komunikasi dan penyampaian informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

### C. Adaptasi

Menurut Richard M. Steers, adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya [23]. Kemampuan adaptasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu organisasi, karena organisasi tidak dapat terlepas dari dinamika perubahan yang terjadi baik dari sisi kebijakan, teknologi, maupun kondisi lingkungan kerja. Dalam indikator adaptasi, suatu organisasi dinilai dari kemampuannya dalam merespons perubahan lingkungan tersebut, menyesuaikan sistem kerja yang ada, serta mempertahankan keberlangsungan operasional organisasi agar tetap berjalan secara optimal meskipun menghadapi berbagai perubahan yang bersifat dinamis. Dalam hal ini, adaptasi dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: peningkatan kemampuan, dan sarana prasarana.

Dalam konteks efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG, aspek adaptasi merujuk pada kemampuan sumber daya manusia, khususnya operator desa, dalam menyesuaikan diri terhadap penggunaan sistem serta perubahan yang terjadi di dalamnya. Suatu sistem dapat dikatakan berjalan efektif apabila operator mampu memahami serta mengoperasikan aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan kemampuan adaptasi sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh operator desa dalam mempelajari dan memahami sistem aplikasi meskipun dengan keterbatasan dukungan pelatihan teknis. Di mana dalam hal ini, operator desa melakukan percobaan langsung pada berbagai menu yang terdapat dalam aplikasi untuk memahami alur pengoperasian sistem secara bertahap. Selain itu, operator juga mencari informasi tambahan mengenai penggunaan aplikasi melalui berbagai sumber pembelajaran, seperti menonton vid eo tutorial serta berdiskusi dengan perangkat desa lain yang telah lebih dahulu menggunakan aplikasi tersebut. Proses komunikasi informal tersebut membantu operator dalam memperoleh pemahaman praktis mengenai cara penggunaan sistem serta solusi terhadap kendala teknis yang muncul dalam proses pengoperasian aplikasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

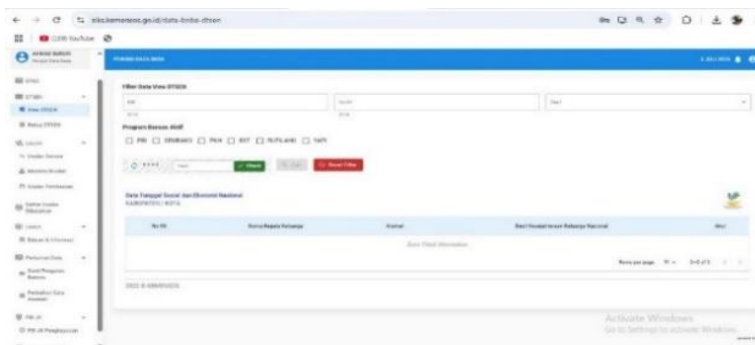
*“Awal-awal itu memang agak kesulitan, dikarenakan saya baru menjabat sebagai Kesra di desa ini itu di tahun 2022 kemarin. Waktu itu juga saya masih belum kenal aplikasi SIKS-NG itu apa. Nah baru sekiatr bulan November itu baru ada Bimtek, dan itu kali pertama saya mengikuti bimtek. Awalnya si saya kurang paham karena menu di aplikasinya itu banyak. Karena saya merasa kurang paham, akhirnya saya belajar sendiri biasanya saya liat dari youtube kadang juga tanya ke teman-teman kesra lain yang sudah lebih dulu pakai SIKS-NG.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahap awal penggunaan aplikasi, operator mengalami kesulitan dalam memahami sistem yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengalaman serta kompleksitas fitur yang terdapat dalam aplikasi. Namun demikian, operator menunjukkan adanya inisiatif untuk beradaptasi dengan cara mempelajari sistem secara mandiri hingga akhirnya mampu memahami alur penggunaan aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi operator sudah mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan yang memadai.

Sementara itu tantangan adaptasi juga muncul seiring dengan adanya perkembangan sistem dalam aplikasi SIKS-NG yang terus menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, pada awal tahun 2025 terjadi pembaruan sistem yang ditandai dengan perubahan basis data dari DTKS menjadi DTKSEN. Perubahan tersebut berdampak pada tampilan menu serta mekanisme pengelolaan data dalam aplikasi, sehingga operator dituntut untuk kembali menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa:

*“Untuk tahun 2025 ini memang ada perubahan dari DTKS menjadi DTKSEN, jadi tampilannya juga ada yang berubah. Awalnya kami juga perlu menyesuaikan lagi dengan menu-menu yang ada di aplikasi. Tapi setelah dipelajari pelan-pelan akhirnya bisa memahami lagi alurnya.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya pembaruan sistem dalam aplikasi SIKS-NG, khususnya perubahan dari DTKS menjadi DTKSEN, menuntut operator untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dari segi mekanisme pengelolaan data maupun tampilan Fitur dalam aplikasi. Pada tahap awal, perubahan tersebut menimbulkan tantangan bagi operator karena perlu mempelajari kembali alur kerja serta fungsi dari menu-menu yang tersedia dalam sistem yang baru. Adapun Perubahan tampilan dalam aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.** Perubahan Tampilan Aplikasi SIKS-NG  
Sumber : Pemerintah Desa Simoangin-Angin (2025)

Gambar 2 menunjukkan adanya perubahan tampilan dalam menu bantuan sosial pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Desa Simoangin-angin. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya penyesuaian jenis dan skema bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga berdampak pada perubahan sistem yang digunakan dalam pengelolaan data kemiskinan. Perubahan ini menuntut operator desa untuk kembali menyesuaikan diri dengan tampilan menu serta prosedur kerja yang baru dalam aplikasi.

Namun demikian, meskipun terdapat pembaruan hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 operator aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-angin belum memperoleh pelatihan teknis atau bimbingan langsung dari Dinas Sosial maupun pihak kecamatan. Ketiadaan pelatihan ini menjadi salah satu kendala dalam proses adaptasi terhadap perubahan sistem yang terjadi, terutama karena perubahan yang dilakukan dalam sistem aplikasi cukup signifikan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa :

*“Sampai sekarang belum pernah ada pelatihan langsung dari Dinsos atau kecamatan. Kalau ada perubahan sistem, ya biasanya cuma dikasih info atau panduan saja.”* (Hasil Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, operator aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-angin belum mendapatkan pelatihan teknis maupun bimbingan secara langsung dari Dinas Sosial ataupun pihak kecamatan. Ketiadaan pelatihan ini menjadi salah satu kendala dalam proses adaptasi terhadap perubahan sistem yang terjadi, terutama mengingat adanya pembaruan dari DTKS menjadi DTKSEN yang membawa perubahan pada mekanisme pengelolaan data serta tampilan fitur dalam aplikasi. Dalam kondisi tersebut, operator hanya memperoleh informasi terkait perubahan sistem melalui panduan atau pemberitahuan secara tidak langsung, tanpa adanya pendampingan teknis yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa proses transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya operator SIKS-NG, belum berjalan secara optimal. Padahal, pelatihan dan bimbingan teknis memiliki peran penting dalam membantu operator memahami secara menyeluruh perubahan sistem, meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data, serta meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi. Tanpa adanya pelatihan yang terstruktur, operator dituntut untuk belajar secara mandiri dalam memahami sistem yang terus mengalami perubahan, yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam proses kerja.

Pemasalahan diatas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekar Arum Puspita Ramadhani dan Isna Fitria Agustina (2025) judul *“Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ( Siks – Ng ) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa”*, yang menunjukkan bahwa meskipun operator telah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem, masih terdapat kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterbatasan pelatihan dan bimbingan teknis. Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri, terutama karena fitur dan sistem dalam aplikasi SIKS-NG cenderung mengalami pembaruan secara berkala.

Selain kemampuan sumber daya manusia, aspek adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Simoangin-angin telah menyediakan perangkat pendukung berupa komputer dan jaringan internet yang digunakan untuk menunjang pengelolaan data dalam aplikasi SIKS-NG. Ketersediaan fasilitas ini memberikan kemudahan bagi operator desa dalam melakukan proses input data, verifikasi data, serta pemutakhiran data masyarakat yang terdaftar dalam sistem. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin yang menyatakan bahwa :

*“Untuk sarana dan prasarana dari desa ini saya rasa sudah cukup memadai. Desa telah menyediakan komputer dan jaringan internet, dan semua fasilitas tersebut dalam kondisi baik.”*

(Hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Simoangin-Angin, 2 Juli 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Simoangin-angin telah mendukung pelaksanaan aplikasi SIKS-NG. Perangkat komputer yang digunakan oleh operator dinilai mampu menunjang proses pengoperasian aplikasi, sementara jaringan internet yang tersedia juga dalam kondisi stabil sehingga mendukung kelancaran akses sistem. Ketersediaan fasilitas ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai tahapan pengelolaan data, mulai dari penginputan, verifikasi, hingga pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Dengan demikian, dukungan sarana dan prasarana yang memadai turut berkontribusi dalam memperlancar proses pengelolaan data serta meningkatkan efisiensi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG di tingkat desa.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Simoangin-angin yang menyampaikan bahwa pemerintah desa berupaya mendukung pelaksanaan aplikasi SIKS-NG dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh operator desa. Kepala desa menjelaskan bahwa ketersediaan perangkat kerja seperti komputer dan jaringan internet menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial di desa. Beliau menyatakan bahwa:

*“Dari pihak desa kami berusaha mendukung penggunaan aplikasi SIKS-NG dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh operator, seperti komputer dan jaringan internet. Harapannya dengan fasilitas tersebut proses pengusulan dan pengelolaan data bantuan sosial bisa berjalan dengan lebih lancar.”* (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Simoangin-angin, 2 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya mendukung pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh operator desa. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan perangkat komputer serta jaringan internet yang digunakan untuk mengakses dan mengoperasikan aplikasi SIKS-NG. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah operator desa dalam melakukan proses pengusulan serta pengelolaan data penerima bantuan sosial melalui sistem yang telah disediakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses pengoperasian aplikasi SIKS-NG di tingkat desa dapat berjalan lebih lancar sehingga mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial secara lebih efektif.

Temuan tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haromin Andriyansyah dengan judul “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lumajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah desa masih belum maksimal sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pengunggahan data dalam aplikasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di setiap desa dapat mempengaruhi kelancaran penerapan sistem informasi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung di masing-masing desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran implementasi sistem informasi, khususnya dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Simoangin-angin pada indikator adaptasi sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kemampuan operator desa dalam menyesuaikan diri terhadap penggunaan aplikasi serta perubahan sistem yang terjadi, seperti peralihan dari DTKS ke DTKSEN. Operator juga menunjukkan inisiatif dalam mempelajari sistem secara mandiri melalui berbagai sumber pembelajaran untuk memahami alur pengoperasian aplikasi. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas yang memadai, seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang mendukung kelancaran proses pengelolaan data bantuan sosial. Ketersediaan fasilitas ini turut menunjang kemampuan adaptasi operator dalam menjalankan aplikasi secara lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya terkait belum optimalnya pelatihan dan bimbingan teknis dari instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan proses adaptasi terhadap perubahan sistem belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa pelatihan yang berkelanjutan agar kemampuan operator dapat semakin meningkat, sehingga penerapan aplikasi SIKS-NG dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terkait efektivitas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Desa Simoangin-Angin, ditemukan bahwa setiap indikator memiliki kondisi yang beragam. Dimana pada indikator pencapaian tujuan, keberadaan aplikasi SIKS-NG dinilai mampu mempermudah kinerja operator dalam melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, khususnya pada tahap verifikasi di lapangan, di mana terdapat ketidaksesuaian antara data alokasi yang tercatat dalam aplikasi dengan kondisi riil penerima bantuan. Selanjutnya, pada indikator integrasi, proses pengusulan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta RT dan RW. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, sehingga berdampak pada belum meratanya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengusulan bantuan sosial. Sementara itu, pada indikator adaptasi, sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya operator, menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan dan perubahan sistem aplikasi. Meskipun pada tahap awal operator mengalami kesulitan, namun seiring berjalannya waktu operator mampu memahami prosedur penggunaan aplikasi melalui proses pembelajaran mandiri serta komunikasi dengan rekan kerja. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang stabil, turut mendukung proses adaptasi tersebut. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dari instansi terkait, terutama setelah adanya pembaruan sistem dari DTKS menjadi DTKSEN pada tahun 2025, yang berdampak pada proses penyesuaian operator terhadap perubahan sistem.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada Pemerintah Desa Simoangin-Angin yang telah memberikan dukungan penuh selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Ahmad Sururi selaku Kasi Kesejahteraan Desa atas partisipasi, kerja sama, serta kontribusinya dalam memberikan data dan informasi yang relevan terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui penerapan digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di tingkat desa.

#### REFERENSI

- [1] S. Endah Wulandari And R. Dwi Wahyunengseh, "Analisis Kuadran Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Kebumen," *J. Mhs. Wacana Publik*, Vol. 4, No. 2, P. 2024, 2024.
- [2] M. Sintha, "Dari Data Ke Dana: Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kota Palangka Raya," *Resolusi J. Sos. Polit.*, Vol. 7, No. 1, Pp. 1–12, 2024, Doi: 10.32699/Resolusi.V7i1.7802.
- [3] M. L. Prayoga, M. Muchtolifah, And S. Sishadiyahati, "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo," *Jambura Econ. Educ. J.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 135–142, 2021, Doi: 10.37479/Jeej.V3i2.11058.
- [4] E. Purwanti, "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data Bps Tahun 2023," *Akad. J. Mhs. Humanis*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1–10, 2024, Doi: 10.37481/Jmh.V4i1.653.
- [5] F. W. Piran And H. R. A. Mardjono, "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 604–618, 2022, Doi: 10.53363/Bureau.V2i1.156.
- [6] F. F. B. Sembiring And R. Nababan, "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undangnomor. 13 Tahun 2011," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, Vol. 4, No. 5, Pp. 6779–6790, 2024.
- [7] A. Rahma *Et Al.*, "Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial," *J. Penelit. Nusant.*, Vol. 1, Pp. 192–198, 2025.
- [8] Y. Andriani, S. Suwitri, And T. Yuniningsih, "Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *J. Agreg. Aksi Reformasi Gov. Dalam Demokr.*, Vol. 11, No. 2, Pp. 129–147, 2023, Doi: 10.34010/Agregasi.V11i2.11255.
- [9] Et Al. Ramadan Ergi And 2024, "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Untuk Pengajuan DtkS," *J. Sos. dan Teknol.* Vol. 4, No. 2, Pp. 109–115, 2024.
- [10] D. Widyaningsih, Nina Toyamah, And Ruhmaniyati, "Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan

- Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia,” *J. Ekon. Dan Pembang.*, Vol. 31, No. 2, Pp. 179–200, 2023, Doi: 10.55981/Jep.
- [11] R. Dwiarto, “Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dan Pemanfaatan Aplikasi ‘Cek Bansos,’” *Pros. Semin. Nas. Unimus*, Vol. 6, Pp. 204–215, 2023.
- [12] M. D. H. Pratama And I. Rodiyah, “Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal,” *Din. Gov.*, Vol. 14, No. 04, Pp. 410–423, 2025, [Online]. Available: [Http://Ejournal.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jdg/Article/View/1198](http://Ejournal.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jdg/Article/View/1198)
- [13] Delia Rana Amanda, P. N. Perdana, And H. Khairunnisa, “Analisis Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022,” *J. Akuntansi, Perpajak. Dan Audit.*, Vol. 5, No. 3, Pp. 530–541, 2024, Doi: 10.21009/Japa.0503.05.
- [14] S. A. P. Ramadhani And I. F. Agustina, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks – Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa,” *Din. Gov.*, Vol. 14, No. 04, Pp. 399–409, 2025, [Online]. Available: [Http://Ejournal.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jdg/Article/View/1198](http://Ejournal.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Jdg/Article/View/1198)
- [15] L. Mursyidah And F. P. Arydianti, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (Siks-Ng) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial,” *Kolaborasi J. Adm. Publik*, Vol. 10, No. 3, Pp. 227–240, 2024, Doi: 10.26618/Kjap.V10i3.16182.
- [16] Haromin And D. Andriyansha, “Efektivitas Penerapan E-Governmentmelalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation(Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung,” *J. Jisipol*, Vol. 6, No. 3, Pp. 34–56, 2022.
- [17] D. E. A. Zebua, F. Hulu, M. Waruwu H, And M. S. D. Mendrofa, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation Untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 1993–2000, 2024, [Online]. Available: [Http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/9649](http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/9649)
- [18] N. T Pae, Hasbullah, I. Kurnia, And Nuraisyah, “Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah,” *Jsim J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, Vol. 5, No. 3, Pp. 439–448, 2024.
- [19] A. Sujastiawan, E. P. Astuti, And I. Harwansyah, “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa,” *JKSAP J. Kapita Sel. Adm. Publik*, vol. 3, no.1, Pp. 103–108, 2022, [Online]. Available: [Http://Www.EJournallppmunsa.Ac.Id/Index.Php/Ksap/Article/View/904](http://Www.EJournallppmunsa.Ac.Id/Index.Php/Ksap/Article/View/904)
- [20] A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, Pp. 81–95, 2018.
- [21] Hasbullah, R. Aristin, Syaiful, S. Anam, And R. Kasanova, “Efektivitas Organisasi Dalam Perspektif Model Richard M Steers Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang,” *Kabilah J. Soc. Community*, Vol. 7, No. 14, Pp. 63–72, 2019.
- [22] N. V. Rahayu And H. Sukmana, “Efektivitas Berkas Mlaku Dewe Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,” *Reformasi*, Vol. 12, No. Desember, Pp. 262–272, 2022.
- [23] M. Setiowati And I.F.Agustina, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pelaporan Keuangan Di Desa Permisian Kecamatan Jabon,” *J. Publicuho*, Vol. 7, No. 3, Pp. 1663–1676, 2024, Doi: 10.35817/Publicuho.V7i3.527.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*